



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Tulip No. 09 Way Mengaku Liwa Lampung Barat, 34812

Telp. (0728) 21106 Fax. (0728) 21106

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 900/03.a/KPTS/IV.01/2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2024-2026

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan perangkat daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terpecah menjadi 2 (dua) perangkat daerah, salah satunya menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah, maka perlu disusun kembali Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah tentang Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 353);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud diktum kesatu menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 sampai dengan 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Januari 2024

KERALA ~~BADAN~~ KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,



OKMAL

Tembusan :
Penjabat Bupati Lampung Barat.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2024-2026**



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Sebagai salah satu daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2022, Kabupaten Lampung Barat diamanatkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan perangkat daerah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Barat terpecah menjadi 2 (dua) perangkat daerah, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lampung Barat dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Barat. Tugas BKAD Kabupaten Lampung Barat adalah membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah. Dengan dibentuknya BKAD Kabupaten Lampung Barat, maka disusunlah dokumen Renstra BKAD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026 ini.

Penyusunan Renstra ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, sehingga akan tercapai sinergi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah. Pada akhirnya, diharapkan dapat terwujud keberhasilan pelaksanaan program-program pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah melalui peningkatan kinerja yang optimal menuju keberhasilan pembangunan daerah.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi sehingga dokumen Renstra ini dapat kami selesaikan. Akhirnya, semoga dokumen ini dapat bermanfaat.

Llwa, 29 Januari 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Ir. OKMAL, M.Si.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19641005 199403 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.3.1 Maksud	3
1.3.2 Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	6
2.1.1 Tugas dan Fungsi.....	6
2.1.2 Struktur Organisasi	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	7
2.2.1 Aparatur	7
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	8
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.4 Tantangan dan Peluang.....	16
2.4.1 Tantangan.....	16
2.4.2 Peluang.....	17
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan	19
3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah.....	21
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	22
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	28

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan.....	31
4.2 Sasaran	31
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	35
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	38
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	46
BAB VIII. PENUTUP	47
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1.....	7

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKD	11
Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKD .	14
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan	20
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	32
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	34
Tabel 6.1. Detail Sub Kegiatan Tahun 2024-2026	36
Tabel 7.1. Indikator Kinerja BKAD	56

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2022 menandakan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 sebagaimana berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat periode 2017-2022.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026, sebagai pedoman penyusunan RKPD dan Renja Tahun 2023.

Renstra OPD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembangunan daerah, agar memiliki arah yang jelas, terarah, dan berkesinambungan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Barat terpecah menjadi 2 (dua) perangkat daerah, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lampung Barat dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Barat. Tugas BKAD Kabupaten Lampung Barat adalah membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah. Dengan terbentuknya BKAD Kabupaten Lampung Barat, maka perlu disusun dokumen Renstra BKAD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026. Untuk maksud itulah, dokumen Renstra BKAD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026 ini disusun.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 16. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 14);
 17. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra BKAD Kabupaten Lampung Barat ini dimaksudkan untuk menyusun rencana pembangunan yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD yang diselaraskan dengan RPD, yang diemban oleh seluruh aparatur, yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga vertikal, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, agar terwujud keberhasilan pelaksanaannya secara sinergis, dan yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Barat.

1.3.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renstra ini adalah :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program yang diemban BKAD yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah, agar kegiatan pembangunan daerah menjadi terpadu, terencana dengan baik, terarah, efektif, mudah dipantau, dan mudah diukur pencapaian hasilnya.
2. Menetapkan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra ini, selanjutnya diharapkan agar seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui perkembangan dan hambatannya, dan ditetapkan solusi terbaik untuk mengatasinya.
3. Sebagai salah satu indikator di dalam evaluasi kinerja aparatur BKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra BKAD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

- BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah
 - 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
 - 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV Tujuan dan Sasaran
 - 4.1 Tujuan
 - 4.2 Sasaran
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB VIII Penutup

BAB II.
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Barat terpecah menjadi 2 (dua) Perangkat Daerah, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lampung Barat dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas dan fungsi BKAD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

a. Tugas

Tugas BKAD adalah membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah.

b. Fungsi

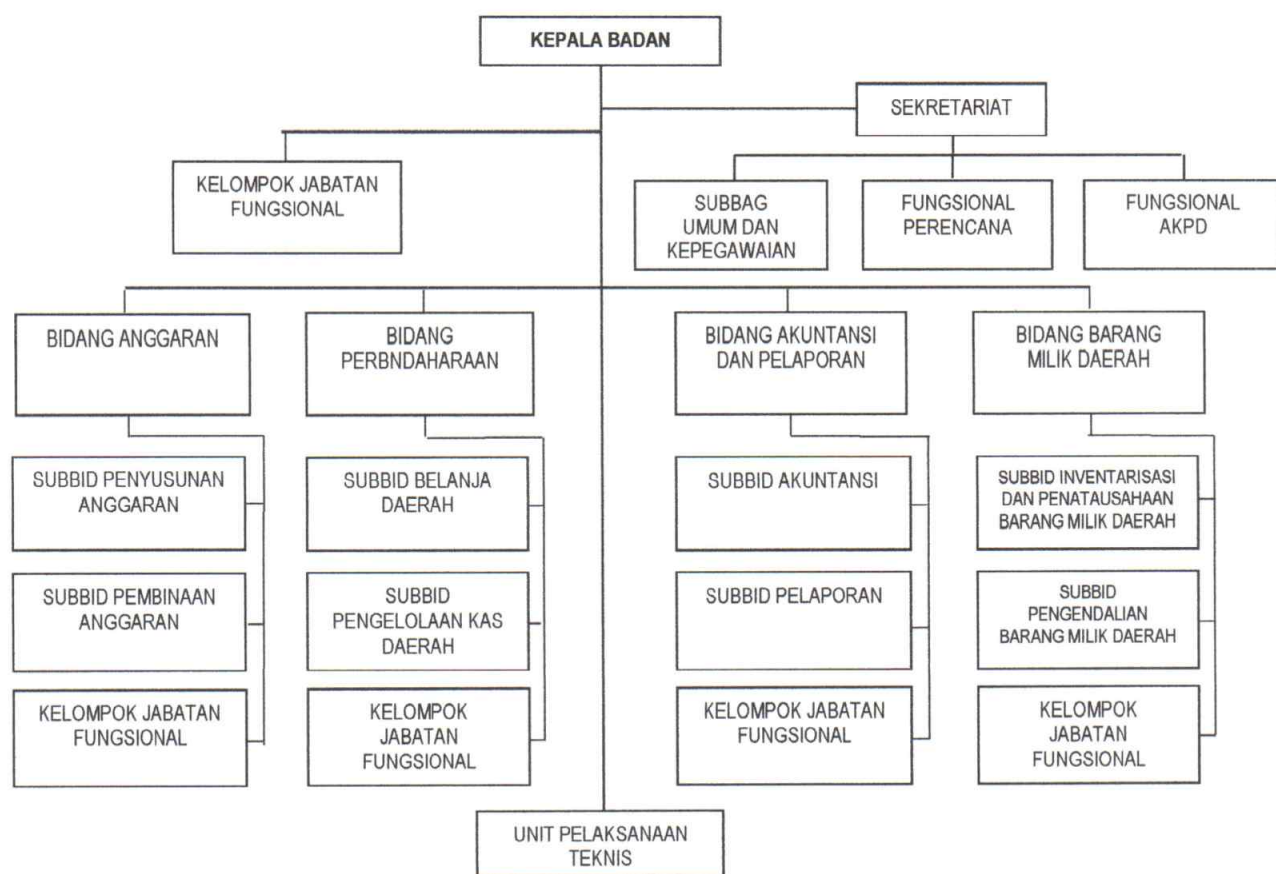
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, BKAD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset daerah;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset daerah;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset daerah;

- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan dan aset daerah;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi BKAD Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1. Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Lampung Barat

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Aparatur

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKAD Kabupaten Lampung Barat didukung oleh sumber daya aparatur. Berikut adalah rincian sumber daya aparatur BKAD :

1. Jumlah Pegawai.

Jumlah pegawai BKAD adalah 45 orang.

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan Ruang.

Jumlah Pegawai BKAD menurut Golongan Ruang :

- Pegawai Golongan IV : 8 orang
- Pegawai Golongan III : 31 orang
- Pegawai Golongan II : 6 orang

3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) BKAD berdasarkan latar belakang pendidikan adalah :

- Sarjana Strata 2 (S2) : 12 orang
- Sarjana Strata 1 (S1) : 25 orang
- D III : 3 orang
- Paket C : 1 orang
- SLTA sederajat : 4 orang

4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Diklat Penjenjangan Struktural Tertinggi.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Diklat Penjenjangan Struktural Tertinggi adalah :

- Golongan IV/c : 1 Orang (Diklat Pim. II)
- Golongan IV/b : 1 Orang (Diklat Pim. III)
- Golongan IV/a : 2 Orang (Diklat Pim. III)
- Golongan IV/a : 4 Orang (Diklat Pim. IV)
- Golongan III/d : 9 Orang (Diklat Pim. IV)
- Golongan III/c : 1 Orang (Diklat Pim. IV)

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya aparatur, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah, BKAD Kabupaten Lampung Barat juga didukung oleh sarana dan prasarana berupa gedung dan bangunan, mesin dan peralatan, instalasi dan aset lainnya, yang semuanya tercantum di dalam neraca dinas.

Berikut adalah rincian sarana dan prasarana BKAD Kabupaten Lampung Barat berdasarkan kelompok besarnya :

1. Mesin dan peralatan :

- Alat berat : 2 unit
- Kendaraan roda empat : 6 unit
- Kendaraan roda dua : 22 unit
- Alat bengkel : 3 unit
- Alat ukur : 2 unit
- Alat kantor dan rumah tangga : 1.488 buah
- Alat pertanian : 1 buah
- Alat studio dan komunikasi : 28 unit

2. Gedung dan bangunan :

- Bangunan gedung : 647 m²
- Bangunan monumen : 276 buah

3. Jalan, jembatan, bangunan air, jaringan dan instalasi :

- Jaringan/instalasi : 2 unit

4. Aset tetap lainnya :

- Buku : 1 paket

5. Aset tak berwujud : 21 unit

6. Aset lain-lain : 318 buah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebelum terpecah menjadi 2 (dua) Perangkat Daerah, BPKD Kabupaten Lampung Barat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Sesuai dengan tugas tersebut, BPKD memiliki fungsi dalam penyusunan kebijakan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; serta pembinaan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Adapun rincian tugas yang dilaksanakan oleh BPKD antara lain :

1. Merencanakan dan melaksanakan kebijakan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
2. Membuat rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Melaksanakan fungsi Bendaharawan Umum Daerah (BUD) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Membuat dan menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
6. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah dalam rangka meningkatkan kekayaan daerah.

Pada masa renstra yang lalu (2017-2022), BPKD memiliki indikator kinerja sebagai acuan keberhasilan tugas yang diemban. Indikator kinerja tersebut antara lain :

1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017.
3. Persentase peningkatan PAD.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan BPKD pada masa Renstra yang lalu (2017-2022) dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut.

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2018-2021

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Pada Tahun ke-			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	(3) ---	(4) ---	(5) ---	(6) WTP	(7) WTP	(8) WTP	(9) WTP	(11) WTP	(12) WTP	(13) WTP	(14) WTP	(16) 100%	(17) 100%	(18) 100%	(19) 100%
2	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017.				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase peningkatan PAD.				3%	3%	3%	3%	4,47%	28,24%	2,46%	3,36%	149%	941,33%	82%	112%

Jika dilihat pada Tabel 2.1., BPKD dapat mencapai seluruh target kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dan mencapai realisasi 100%, bahkan melampaui target.

Namun ada 1 (satu) indikator kinerja yang rasio capaian kinerja setiap tahunnya cukup besar dan fluktuatif, yaitu "Persentase peningkatan PAD".

"Persentase peningkatan PAD" pada tahun ke-3 (tahun 2020) tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan, di mana realisasi kinerjanya adalah sebesar 2,46% dari target 3%, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 82%. Target peningkatan PAD tidak tercapai diakibatkan oleh menurunnya target PAD TA. 2020 akibat pandemi Covid-19, yang mengharuskan diambilnya kebijakan pemberian stimulus Pajak dan Retribusi Daerah.

Adapun keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan BPKD dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas.

Kabupaten Lampung Barat selama 11 tahun berturut-turut meraih penghargaan berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan dilakukan dengan baik, memperhatikan prioritas daerah, dan taat aturan.

2. Pengalokasian anggaran yang baik.

Meski saat ini tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi di mana alokasi PAD Kabupaten Lampung Barat terhadap total pendapatan daerah masih rendah, namun Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat mengelola APBD dengan baik. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki *cash flow* yang sehat dan tidak pernah mengalami gagal bayar untuk alokasi belanja yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses penganggaran dilakukan dengan baik, memperhatikan prioritas daerah, sesuai kebutuhan, dan taat aturan.

3. Kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah dapat menjadi peluang yang baik bagi pemerintah daerah. Contohnya adalah kebijakan pendaerahan PBB. Dengan didaerhkannya PBB, yakni kewenangan pengelolaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

4. Sumber daya.

BPKD memiliki 2 sumber daya utama yaitu aparatur dan sarana prasarana. Kedua sumber daya tersebut dengan keterbatasannya dapat dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD.

Selanjutnya, anggaran dan realisasi pendanaan atas pelayanan BPKD dapat dilihat pada Tabel 2.2. berikut.

Tabel 2.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2018-2021

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	1 (12)	2 (13)	3 (14)	4 (15)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	6.538.291.200	5.556.234.900	5.719.643.500	214.147.271.342	5.949.080.868	5.353.384.646,50	5.044.585.582	206.034.103.338	90,99%	96,35%	88,20%	96,21%	219,95%	225,96%
Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017.	1.822.026.500	1.886.569.500	955.002.400	1.469.417.400	1.597.071.283	1.809.205.696,00	890.216.700	1.458.804.572	87,65%	95,90%	93,22%	99,28%	-6,92%	-2,97%
Persentase peningkatan PAD.	2.012.946.000	1.715.579.000	1.110.210.800	1.654.452.200	1.799.145.050	1.644.683.657,00	1.103.421.300	1.598.236.000	89,38%	95,87%	99,39%	96,60%	-6,33%	-3,87%

Jika dilihat pada Tabel 2.2., realisasi pendanaan pelayanan BPKD dapat dikategorikan baik, di mana pagu anggaran seluruh program pembangunan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian ketiga indikator kinerja rata-rata mencapai realisasi di atas 90% setiap tahunnya selama 4 tahun, dengan rincian sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mencapai realisasi anggaran rata-rata 92,94%.
2. Indikator kinerja Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017 mencapai realisasi anggaran rata-rata di atas 94,01%.
3. Indikator kinerja Persentase peningkatan PAD mencapai realisasi anggaran rata-rata di atas 95,31%.

Sementara itu, rata-rata pertumbuhan anggaran ketiga indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki pertumbuhan anggaran dan realisasi cukup tinggi yang mencapai lebih dari 200%, hal ini dikarenakan pada tahun 2021 terdapat pagu program yang cukup besar berupa kegiatan penyaluran bantuan keuangan untuk belanja tidak terduga, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dan alokasi dana desa yang nilainya mencapai lebih dari 200 Milyar Rupiah sehingga menambah pertumbuhan anggaran yang signifikan. Pelaksanaan kegiatan oleh BPKD ini sesuai dengan amanat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Indikator kinerja Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017 memiliki pertumbuhan anggaran dan realisasi yang minus. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 dan 2021 terjadi pengurangan anggaran yang disebabkan oleh kebijakan daerah terkait prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta pada tahun itu terjadi Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak akhir tahun 2019. Pandemi ini menuntut Pemerintah

Daerah untuk mengambil kebijakan Refocussing Anggaran yang diprioritaskan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Dengan demikian, pertumbuhan anggaran yang minus otomatis diikuti dengan pertumbuhan realisasi yang juga minus.

3. Indikator kinerja Persentase peningkatan PAD memiliki pertumbuhan anggaran dan realisasi yang minus. Anggaran program yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini menurun sejak tahun 2019, walaupun ada peningkatan anggaran pada tahun 2021 dari tahun 2020. Penurunan anggaran tersebut disebabkan oleh kebijakan daerah terkait prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Sementara untuk tahun 2020 memiliki anggaran terendah karena pada tahun itu terjadi Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak akhir tahun 2019. Pandemi ini menuntut Pemerintah Daerah untuk mengambil kebijakan Refocussing Anggaran yang diprioritaskan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Dengan demikian, pertumbuhan anggaran yang minus otomatis diikuti dengan pertumbuhan realisasi yang juga minus.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang keuangan dan aset daerah, BKAD Kabupaten Lampung Barat menghadapi tantangan yang berasal dari luar lingkungannya dan harus dijawab oleh perangkat daerah dengan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Tantangan tersebut antara lain:

1. Era globalisasi.

Arus globalisasi yang deras menuntut aparatur BKAD untuk meningkatkan kualitas agar tidak tenggelam di dalamnya, namun tentu tanpa harus melunturkan etika dan budaya timur yang dimiliki dalam mengemban tugasnya.

2. Arus informasi dan kemajuan teknologi.

Arus informasi dan kemajuan teknologi memiliki dampak positif dan negatif. Jika dimanfaatkan secara tidak

bertanggung jawab maka rentan untuk disalahgunakan, sebaliknya jika dimanfaatkan dengan bijak maka akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD.

3. Pencanaan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi yang tengah digalakkan saat ini harus didukung oleh seluruh unsur pemerintahan baik pusat maupun daerah. Inti dari reformasi birokrasi adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan profesional yang didukung oleh aparatur yang memiliki kapabilitas dan mumpuni. Reformasi birokrasi dapat diawali dengan rekrutmen pegawai yang bebas dari praktik KKN, dilanjutkan dengan peningkatan kualitas aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan pembangunan.

2.4.2 Peluang

Selain dihadapkan dengan tantangan, BKAD Kabupaten Lampung Barat juga memiliki peluang yang dapat mendukung pelaksanaan tugasnya, antara lain :

1. Era otonomi daerah.

Otonomi daerah membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia, dimana Daerah Otonom (Kabupaten/Kota) dituntut untuk lebih mampu berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pembiayaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan sesuai dengan standar, norma dan kebijakan pemerintah kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama. Peran BKAD dalam hal ini adalah sebagai pembantu Kepala Daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang keuangan dan aset daerah.

2. Kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi telah merambah sampai ke Kabupaten kecil seperti Kabupaten Lampung Barat. Kemajuan teknologi yang dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD.

3. Sumber daya.

BKAD memiliki 2 sumber daya utama yaitu aparatur dan sarana prasarana penunjang tugas. Jika kedua sumber daya tersebut dapat dioptimalkan, maka akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD, meskipun harus diakui bahwa kondisi saat ini dirasa masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

BAB III.
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh BKAD Kabupaten Lampung Barat, antara lain :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang dinamis.

Penyebab :

- Kabupaten Lampung Barat selama lebih dari 10 tahun berturut-turut meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Akan tetapi dengan pencapaian tersebut, semakin sulit untuk mempertahankan Opini WTP, karena Auditor BPK dan Auditor Independen (Kantor Akuntan Publik) terus meningkatkan standar penilaian.
- Regulasi di bidang pengelolaan keuangan sangat dinamis, sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya, misalnya di dalam penyusunan APBD yang telah berjalan.

2. Pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal.

Penyebab :

- Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikan Barang Milik Daerah. Permasalahan ini terkait dengan identifikasi dan inventarisasi.
- Belum tersedianya basis data (database) yang akurat dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah.
- Belum optimalnya pemahaman sumber daya pengelola BMD dalam pengelolaan BMD.
- Regulasi di bidang pengelolaan aset sangat dinamis, sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya, misalnya di dalam penyusunan Standar Satuan Harga yang mempengaruhi penyusunan APBD.

Selanjutnya pemetaan permasalahan dalam rangka penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pengelolaan Keuangan Daerah.	Pengelolaan Keuangan Daerah yang dinamis.	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Lampung Barat selama lebih dari 10 tahun berturut-turut meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Akan tetapi dengan pencapaian tersebut, semakin sulit untuk mempertahankan Opini WTP, karena Auditor BPK dan Auditor Independen (Kantor Akuntan Publik) terus meningkatkan standar penilaian. - Regulasi di bidang pengelolaan keuangan sangat dinamis, sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya, misalnya di dalam penyusunan APBD yang telah berjalan.
2.	Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal.	<ul style="list-style-type: none"> - Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikan Barang Milik Daerah. Permasalahan ini terkait dengan identifikasi dan inventarisasi. - Belum tersedianya basis data (database) yang akurat dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah. - Belum optimalnya pemahaman sumber daya pengelola BMD dalam pengelolaan BMD. - Regulasi di bidang pengelolaan aset sangat dinamis, sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya, misalnya di dalam penyusunan Standar Satuan Harga yang mempengaruhi penyusunan APBD.

3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan sasaran jangka menengah pada Renstra BKAD, ada beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh BKAD Kabupaten Lampung Barat.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelayanan BKAD antara lain :

1. Regulasi di bidang pengelolaan keuangan sangat dinamis, sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya, misalnya di dalam penyusunan APBD yang telah berjalan Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah yang belum optimal.
2. Pengelolaan aset daerah belum optimal.
3. Regulasi di bidang pengelolaan aset sangat dinamis, sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya, misalnya di dalam penyusunan Standar Satuan Harga yang mempengaruhi penyusunan APBD
4. Sarana dan prasarana kantor yang belum memadai.
5. Pemahaman aparatur tentang peraturan perundangan serta kepatuhan baik aparatur maupun masyarakat terhadap Peraturan Perundangan tersebut yang belum optimal.
6. Koordinasi dengan *stake holders* yang belum optimal.

Sedangkan faktor-faktor pendorong pelaksanaan pelayanan BKAD antara lain :

1. Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas.

Kabupaten Lampung Barat selama 8 tahun berturut-turut meraih penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Prestasi ini selain merupakan capaian daerah yang patut diapresiasi, juga menjadi tantangan bagi seluruh perangkat daerah di bawah koordinasi BKAD untuk terus memantapkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Sumber daya.

BKAD memiliki 2 sumber daya utama yaitu aparatur dan sarana prasarana penunjang tugas. Jika kedua sumber daya tersebut dapat dioptimalkan, maka akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS, ada beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh BKAD Kabupaten Lampung Barat.

Berkaitan dengan RTRW, dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

Rencana umum tata ruang nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional yang disusun guna menjaga integritas nasional, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor, serta keharmonisan antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana umum tata ruang provinsi adalah rencana kebijakan operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan.

Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan.

Tujuan RTRW Kabupaten Lampung Barat adalah “Mewujudkan ruang Kabupaten yang berkelanjutan dan berdaya saing berbasis agro, energi terbarukan, dan pariwisata”.

Dengan melihat RTRW tersebut, faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan BKAD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat

- BKAD Kabupaten Lampung Barat masih kekurangan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam rangka pelayanan administrasi yang cepat, akurat dan memuaskan.
- Meski Peraturan Perundangan untuk mendukung tugas dan fungsi BKAD, yakni peraturan perundangan yang saling menunjang dan memperkuat telah memadai, namun pemahaman aparatur tentang peraturan perundangan serta kepatuhan baik aparatur maupun masyarakat terhadap Peraturan Perundangan tersebut masih perlu ditingkatkan.
- Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BKAD memerlukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Harus diakui, saat ini koordinasi antar*stake holders* masih belum optimal, yang terkadang menghambat penyelesaian tugas. Koordinasi dan rekonsiliasi antar*stake holders* ini diupayakan terus ditingkatkan meski kadang terkendala jauhnya jarak dan terhambatnya jalur komunikasi.

2. Faktor Pendorong

- Era otonomi daerah. Peran BKAD dalam hal ini adalah sebagai pembantu Kepala Daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang keuangan dan aset daerah.

- Kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi telah merambah sampai ke Kabupaten kecil seperti Kabupaten Lampung Barat. Kemajuan teknologi yang dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab dirasa sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD.

- Sumber daya.

BKAD memiliki 2 sumber daya utama yaitu aparatur dan sarana prasarana penunjang tugas. Jika kedua sumber daya

tersebut dapat dioptimalkan, maka akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD.

Sementara itu dari implikasi KLHS, faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh BKAD Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat dengan menggunakan analisis SWOT, yang terbagi ke dalam 2 lingkungan strategis, yaitu :

1. Lingkungan internal dari dalam organisasi, terdiri dari :

a. Kekuatan (*Strength*)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BKAD Kabupaten Lampung Barat memiliki berbagai potensi yang jika dimanfaatkan secara optimal akan menjadi kekuatan organisasi dalam mencapai kinerja yang baik, di antaranya :

- Sumber daya.

BKAD memiliki 2 sumber daya utama yaitu aparatur dan sarana prasarana penunjang tugas. Jika kedua sumber daya tersebut dapat dioptimalkan, maka akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD.

- Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas.

Kabupaten Lampung Barat selama 8 tahun berturut-turut meraih penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Prestasi ini selain merupakan capaian daerah yang patut diapresiasi, juga menjadi tantangan bagi seluruh perangkat daerah di bawah koordinasi BKAD untuk terus memantapkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

- Pengalokasian anggaran yang baik.

Meski saat ini tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi di mana alokasi PAD Kabupaten Lampung Barat terhadap total pendapatan daerah masih rendah, namun Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

dapat mengelola APBD dengan baik. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki *cash flow* yang sehat dan tidak pernah mengalami gagal bayar untuk alokasi belanja yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses penganggaran dilakukan dengan baik, memperhatikan prioritas daerah, sesuai kebutuhan, dan taat aturan.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh BKAD Kabupaten Lampung Barat yang menjadi kelemahannya, antara lain :

- Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah.
Selain menjadi kekuatan, sumber daya aparatur juga menjadi kelemahan BKAD. Saat ini, BKAD masih kekurangan aparatur mengingat volume dan beban pekerjaan yang membutuhkan dukungan lebih banyak personil. Selain itu, sejalan dengan perkembangan pendayagunaan aparatur negara, aparatur BKAD perlu lebih meningkatkan kualitas menyangkut tugas pelayanan dan pemahaman penatausahaan bidang keuangan dan aset daerah.
- Sarana dan prasarana kantor.
BKAD Kabupaten Lampung Barat juga masih kekurangan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam rangka pelayanan yang cepat, akurat dan memuaskan.
- Regulasi.
Meski Peraturan Perundangan untuk mendukung tugas dan fungsi BKAD, yakni peraturan perundangan yang saling menunjang dan memperkuat telah memadai, namun pemahaman aparatur tentang peraturan perundangan serta kepatuhan baik aparatur maupun masyarakat terhadap Peraturan Perundangan tersebut masih perlu ditingkatkan.

- Koordinasi dengan *stake holders*.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BKAD memerlukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Harus diakui, saat ini koordinasi antar*stake holders* masih belum optimal, yang terkadang menghambat penyelesaian tugas. Koordinasi dan rekonsiliasi antar*stake holders* ini diupayakan terus ditingkatkan.

2. Lingkungan eksternal dari luar organisasi, terdiri dari :

a. Peluang (*Opportunity*)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang keuangan dan aset daerah, BKAD Kabupaten Lampung Barat menghadapi tantangan yang berasal dari luar lingkungannya dan harus dijawab oleh perangkat daerah dengan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Tantangan tersebut antara lain :

- Era globalisasi.

Arus globalisasi yang deras mau tidak mau menuntut aparat BKAD untuk meningkatkan kualitas agar tidak tenggelam di dalamnya, namun tentu tanpa harus melunturkan etika dan budaya timur yang dimiliki dalam mengemban tugasnya.

- Era otonomi daerah.

Otonomi daerah membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia, dimana Daerah Otonom (Kabupaten/Kota) dituntut untuk lebih mampu berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pembiayaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan sesuai dengan standar, norma dan kebijakan pemerintah. Peran BKAD dalam hal ini adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan

pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan aset.

- Arus informasi dan kemajuan teknologi.

Derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi merupakan tantangan selanjutnya yang dihadapi BKAD. Arus informasi dan kemajuan teknologi memiliki dampak positif dan negatif, jika dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab maka rentan untuk disalahgunakan, sebaliknya jika dimanfaatkan dengan bijak maka akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD.

- Pencanaan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi yang tengah digalakkan saat ini harus didukung oleh seluruh unsur pemerintahan baik pusat maupun daerah. Inti dari reformasi birokrasi adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan profesional yang didukung oleh aparatur yang memiliki kapabilitas dan mumpuni. Reformasi birokrasi dapat diawali dengan rekrutmen pegawai yang bebas dari praktik KKN, bisa juga diawali dengan memperhatikan kondisi dan isu-isu yang dihadapi oleh pemerintahan. Selanjutnya reformasi birokrasi dijawab dengan peningkatan kualitas aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan pembangunan.

b. Ancaman (*Threats*)

Selain dihadapkan dengan tantangan dari luar organisasi, BKAD Kabupaten Lampung Barat juga dihadapkan pada ancaman yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Ancaman tersebut antara lain :

- Arus informasi dan kemajuan teknologi.

Derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi selain menjadi tantangan juga dapat menjadi ancaman yang dihadapi BKAD. Arus informasi dan kemajuan teknologi jika dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab maka rentan untuk disalahgunakan.

- Era reformasi.

Era reformasi ditandai dengan kebebasan berpendapat dan tuntutan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, di satu sisi membawa perubahan positif bagi iklim demokrasi dan pemerintahan di Indonesia, namun di sisi lain muncul beragam organisasi dan lembaga yang mengatasnamakan masyarakat dan kebebasan berpendapat tadi yang dalam praktiknya justru merongrong penegakan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

- Kondisi wilayah.

Kondisi wilayah yang relatif luas dan adanya daerah-daerah yang sulit terjangkau serta wilayah Lampung Barat yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor secara umum dapat mengancam stabilitas pemerintahan sedangkan khusus di bidang keuangan membutuhkan perhatian di sisi anggaran.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Lampung Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang dihadapi, yang ditinjau antara lain dari :

1. Gambaran pelayanan BKAD.
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra BKAD.
3. Implikasi RTRW bagi pelayanan BKAD.
4. Implikasi KLHS bagi pelayanan BKAD.

Dari keempat poin tinjauan tersebut, dapat disimpulkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dilakukan oleh BKAD sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor Penghambat

Faktor ini, baik itu disebut sebagai tantangan, permasalahan, kelemahan, ataupun ancaman, terdiri dari :

- Kondisi wilayah yang relatif luas dan adanya daerah-daerah yang sulit terjangkau serta wilayah Lampung Barat yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor.
- Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah yang belum optimal.
- Sarana dan prasarana kantor yang belum memadai.
- Pemahaman aparatur tentang peraturan perundangan serta kepatuhan baik aparatur maupun masyarakat terhadap Peraturan Perundangan tersebut yang belum optimal.
- Koordinasi dengan *stake holders* yang belum optimal.

2. Faktor-Faktor Pendorong

Faktor ini, baik itu disebut sebagai peluang ataupun kekuatan, terdiri dari :

- Era otonomi daerah.

Peran BKAD dalam hal ini adalah sebagai pembantu Kepala Daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah.

- Kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi telah merambah sampai ke Kabupaten kecil seperti Kabupaten Lampung Barat. Kemajuan teknologi yang dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab dirasa sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD.

- Sumber daya.

BKAD memiliki 2 sumber daya utama yaitu aparatur dan sarana prasarana penunjang tugas. Jika kedua sumber daya tersebut dapat dioptimalkan, maka akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD.

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, harus dirumuskan langkah-langkah yang tepat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Inilah yang disebut dengan strategi. Untuk menetapkan strategi tersebut, BKAD Kabupaten Lampung Barat menggunakan metoda analisis SWOT.

Berdasarkan metoda tersebut, diperoleh hasil penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra BKAD ini. Isu-isu strategis BKAD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, di tengah era sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi. Saat ini Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah memiliki berbagai aplikasi yang terintegrasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan, yang menjadikan pekerjaan lebih efektif, mudah diakses, dan *up to date*, serta dalam rangka menyederhanakan dan mengotomatisasi proses kerja.
2. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, mengingat Kabupaten Lampung Barat selama lebih dari 10 tahun berturut-turut meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Prestasi ini selain merupakan capaian daerah yang patut diapresiasi, juga menjadi tantangan bagi seluruh perangkat daerah di bawah koordinasi BKAD untuk terus memantapkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi, karena ke depannya tantangan akan semakin berat, selain bahwa mempertahankan sebuah prestasi lebih sulit dibandingkan meraihnya.
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah berbasis sistem informasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Potensi penurunan Pendapatan Daerah akibat penurunan target PAD dan pengurangan Dana Transfer ke daerah sebagai dampak kondisi *force majeure* yang tidak dapat diprediksi ke depannya, seperti pandemi penyakit dan bencana alam.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi yang memuat pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang ditetapkan. Tujuan BKAD adalah :

“Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat”.

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya menjadi efisien dan efektif. Sasaran BKAD adalah :

“Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah”.

Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BKAD dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan pada Tahun ke-			Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-		
			1	2	3			1	2	3
(1) 1	(2) Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.	(3) Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	(4) WTP	(5) WTP	(6) WTP	(7) 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah.	(8) Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	(9) WTP	(10) WTP	(11) WTP

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program dan kegiatan yang harus dan akan dilaksanakan.

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta kondisi lingkungan yang dihadapi, maka strategi yang akan dilaksanakan oleh BKAD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penganggaran APBD yang tepat waktu;
2. Melaksanakan manajemen/pengelolaan kas daerah yang efektif dan efisien;
3. Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu;
4. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan.

Adapun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh BKAD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas penganggaran APBD;
2. Peningkatan kualitas manajemen/pengelolaan kas daerah;
3. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
4. Peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah.

Untuk melihat relevansi dan konsistensi antara pernyataan Tujuan dan Sasaran RPD periode 2024-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan BKAD, berikut adalah rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan BKAD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana tertuang di dalam Tabel 5.1. berikut ini.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2024-2026

TUJUAN RPD : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan			
SASARAN RPD: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah.	1. Melaksanakan penganggaran APBD yang tepat waktu.	1. Peningkatan kualitas penganggaran APBD.
		2. Melaksanakan manajemen/ pengelolaan kas daerah yang efektif dan efisien.	2. Peningkatan kualitas manajemen/ pengelolaan kas daerah.
		3. Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu.	3. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
		4. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan.	4. Peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada kurun waktu 2024-2026, BKAD Kabupaten Lampung Barat memiliki program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026. Program pembangunan tersebut diaplikasikan melalui berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan lokalitas kewenangan BKAD Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKAD Kabupaten Lampung Barat beserta indikator kinerja, target, dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2024-2026 secara lengkap dapat dilihat pada lembar Lampiran.

Selanjutnya, detail sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKAD Kabupaten Lampung Barat selama masa Renstra 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1. berikut :

Tabel 6.1.
Detail Sub Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2024-2026

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan (Tahun)		
		2024	2025	2026
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
5.02.01.2.01.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
5.02.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 13 dokumen	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 13 dokumen	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 13 dokumen
5.02.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen
5.02.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen
5.02.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen	Penyusunan dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen	Penyusunan dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen
5.02.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen
5.02.01.2.02.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD selama 12 bulan sebanyak 12 laporan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD selama 12 bulan sebanyak 12 laporan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD selama 12 bulan sebanyak 12 laporan
5.02.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 17 laporan, terdiri dari 5 Laporan Tahunan (Laporan Kinerja, LKPJ, LPPD, EKPPD, dan Laporan Akhir Kegiatan), dan 12 Laporan Evaluasi Triwulanan (Evaluasi SAKIP Per Triwulan, Evaluasi Renja Per Triwulan, dan Evaluasi Rencana Aksi Per Triwulan)	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 17 laporan, terdiri dari 5 Laporan Tahunan (Laporan Kinerja, LKPJ, LPPD, EKPPD, dan Laporan Akhir Kegiatan), dan 12 Laporan Evaluasi Triwulanan (Evaluasi SAKIP Per Triwulan, Evaluasi Renja Per Triwulan, dan Evaluasi Rencana Aksi Per Triwulan)	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 17 laporan, terdiri dari 5 Laporan Tahunan (Laporan Kinerja, LKPJ, LPPD, EKPPD, dan Laporan Akhir Kegiatan), dan 12 Laporan Evaluasi Triwulanan (Evaluasi SAKIP Per Triwulan, Evaluasi Renja Per Triwulan, dan Evaluasi Rencana Aksi Per Triwulan)

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan (Tahun)		
		2024	2025	2026
5.02.01.2.02.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
5.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 40 orang	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 42 orang	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 44 orang
5.02.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan
5.02.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD sebanyak 2 laporan (Laporan Semester 1 dan Semester 2)	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD sebanyak 2 laporan (Laporan Semester 1 dan Semester 2)	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD sebanyak 2 laporan (Laporan Semester 1 dan Semester 2)
5.02.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebanyak 1 dokumen	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebanyak 1 dokumen	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebanyak 1 dokumen
5.02.01.2.03.	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
5.02.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 19 laporan, terdiri dari 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulanan, 2 Laporan Semesteran, dan 1 Laporan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 19 laporan, terdiri dari 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulanan, 2 Laporan Semesteran, dan 1 Laporan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 19 laporan, terdiri dari 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulanan, 2 Laporan Semesteran, dan 1 Laporan Akhir Tahun
5.02.01.2.05.	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
5.02.01.2.05.05.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai berupa penilaian prestasi kerja PNS atas capaian Sasaran Kerja PNS (SKP) yang dilaksanakan setiap tahun	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai berupa penilaian prestasi kerja PNS atas capaian Sasaran Kerja PNS (SKP) yang dilaksanakan setiap tahun	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai berupa penilaian prestasi kerja PNS atas capaian Sasaran Kerja PNS (SKP) yang dilaksanakan setiap tahun
5.02.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pengiriman Pegawai untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, termasuk Diklat Struktural dan Fungsional, sebanyak 3 orang	Pengiriman Pegawai untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, termasuk Diklat Struktural dan Fungsional, sebanyak 3 orang	Pengiriman Pegawai untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, termasuk Diklat Struktural dan Fungsional, sebanyak 3 orang
5.02.01.2.06.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
5.02.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 1 paket pengadaan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 1 paket pengadaan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 1 paket pengadaan

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan (Tahun)		
		2024	2025	2026
5.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 1 paket pengadaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 1 paket pengadaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 1 paket pengadaan
5.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dengan berlangganan Surat Kabar Harian Umum sebanyak 4 SKHU selama 12 bulan	Penyediaan Bahan Bacaan dengan berlangganan Surat Kabar Harian Umum sebanyak 4 SKHU selama 12 bulan	Penyediaan Bahan Bacaan dengan berlangganan Surat Kabar Harian Umum sebanyak 4 SKHU selama 12 bulan
5.02.01.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman untuk tamu berupa biaya makan sebanyak 60 kotak, yang direncanakan untuk 5 orang per bulan selama 12 bulan, dan biaya snack sebanyak 204 kotak yang direncanakan untuk 17 orang per bulan selama 12 bulan	Penyediaan makanan dan minuman untuk tamu berupa biaya makan sebanyak 60 kotak, yang direncanakan untuk 5 orang per bulan selama 12 bulan, dan biaya snack sebanyak 204 kotak yang direncanakan untuk 17 orang per bulan selama 12 bulan	Penyediaan makanan dan minuman untuk tamu berupa biaya makan sebanyak 60 kotak, yang direncanakan untuk 5 orang per bulan selama 12 bulan, dan biaya snack sebanyak 204 kotak yang direncanakan untuk 17 orang per bulan selama 12 bulan
5.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan biaya perjalanan dinas yaitu : - Luar daerah untuk melaksanakan konsultasi dan kegiatan lain di Provinsi Lampung sebanyak 23 paket, Ibu Kota Negara 10 paket, dan daerah lainnya 1 paket - Luar daerah untuk melaksanakan rapat di Provinsi Lampung sebanyak 2 paket dan Ibu Kota Negara 2 paket - Dalam daerah di Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat sebanyak 10 paket	Penyediaan biaya perjalanan dinas yaitu : - Luar daerah untuk melaksanakan konsultasi dan kegiatan lain di Provinsi Lampung sebanyak 25 paket, Ibu Kota Negara 12 paket, dan daerah lainnya 1 paket - Dalam daerah di Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat sebanyak 10 paket	Penyediaan biaya perjalanan dinas yaitu : - Luar daerah untuk melaksanakan konsultasi dan kegiatan lain di Provinsi Lampung sebanyak 25 paket, Ibu Kota Negara 12 paket, dan daerah lainnya 1 paket - Dalam daerah di Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat sebanyak 10 paket
5.02.01.2.07.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5.02.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan peralatan kantor dan mesin lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja aparatur BKAD sebanyak 18 unit	Penyediaan peralatan kantor dan mesin lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja aparatur BKAD sebanyak 4 unit	Penyediaan peralatan kantor dan mesin lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja aparatur BKAD sebanyak 5 unit
5.02.01.2.08.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5.02.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyusunan laporan terkait penyediaan jasa surat menyurat dalam rangka mendukung kegiatan arsiparis di BKAD	Penyusunan laporan terkait penyediaan jasa surat menyurat dalam rangka mendukung kegiatan arsiparis di BKAD	Penyusunan laporan terkait penyediaan jasa surat menyurat dalam rangka mendukung kegiatan arsiparis di BKAD
5.02.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, berupa pembayaran atas biaya langganan dan pemakaian telepon (termasuk Speedy) sebanyak 2 rekening, air 1 rekening, dan listrik 4 rekening, selama 12 bulan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, berupa pembayaran atas biaya langganan dan pemakaian telepon (termasuk Speedy) sebanyak 2 rekening, air 1 rekening, dan listrik 4 rekening, selama 12 bulan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, berupa pembayaran atas biaya langganan dan pemakaian telepon (termasuk Speedy) sebanyak 2 rekening, air 1 rekening, dan listrik 4 rekening, selama 12 bulan

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan (Tahun)		
		2024	2025	2026
5.02.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<p>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran Iuran BPJS, JKK, JKM ASN - Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah - Pembayaran Iuran JKK dan JKM Non ASN untuk THLS dan pekerja rentan - Pembayaran jasa tenaga kebersihan dan tenaga administrasi - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor lainnya 	<p>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran Iuran BPJS, JKK, JKM ASN - Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah - Pembayaran Iuran JKK dan JKM Non ASN untuk THLS dan pekerja rentan - Pembayaran jasa tenaga kebersihan dan tenaga administrasi - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor lainnya 	<p>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran Iuran BPJS, JKK, JKM ASN - Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah - Pembayaran Iuran JKK dan JKM Non ASN untuk THLS dan pekerja rentan - Pembayaran jasa tenaga kebersihan dan tenaga administrasi - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor lainnya
5.02.01.2.09.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5.02.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<p>Pembayaran biaya pemeliharaan dan pajak perizinan kendaraan dinas sebanyak 23 unit, yang terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 5 unit dan kendaraan dinas roda dua sebanyak 18 unit</p>	<p>Pembayaran biaya pemeliharaan dan pajak perizinan kendaraan dinas sebanyak 23 unit, yang terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 5 unit dan kendaraan dinas roda dua sebanyak 18 unit</p>	<p>Pembayaran biaya pemeliharaan dan pajak perizinan kendaraan dinas sebanyak 23 unit, yang terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 5 unit dan kendaraan dinas roda dua sebanyak 18 unit</p>
5.02.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<p>Pembayaran biaya pemeliharaan peralatan kantor dan mesin lainnya sebanyak 31 unit yang terdiri dari pemeliharaan genset, mesin ketik, ac, komputer pc, laptop, dan printer untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja</p>	<p>Pembayaran biaya pemeliharaan peralatan kantor dan mesin lainnya sebanyak 31 unit yang terdiri dari pemeliharaan genset, mesin ketik, ac, komputer pc, laptop, dan printer untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja</p>	<p>Pembayaran biaya pemeliharaan peralatan kantor dan mesin lainnya sebanyak 31 unit yang terdiri dari pemeliharaan genset, mesin ketik, ac, komputer pc, laptop, dan printer untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja</p>
5.02.01.2.09.09.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<p>Pembayaran biaya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya untuk 8 unit gedung di BKAD</p>	<p>Pembayaran biaya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya untuk 8 unit gedung di BKAD</p>	<p>Pembayaran biaya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya untuk 8 unit gedung di BKAD</p>
05.02.02	PROGRAM PENGLOLAAN KEUANGAN DAERAH			
5.02.02.2.01.	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			
5.02.02.2.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	<p>Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS sebanyak 2 dokumen</p>	<p>Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS sebanyak 2 dokumen</p>	<p>Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS sebanyak 2 dokumen</p>
5.02.02.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	<p>Penyusunan Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 2 dokumen</p>	<p>Penyusunan Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 2 dokumen</p>	<p>Penyusunan Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 2 dokumen</p>

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan (Tahun)		
		2024	2025	2026
5.02.02.2.01.07.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah berupa Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah berupa Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah berupa Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebanyak 2 dokumen
5.02.02.2.01.08.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah berupa Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah berupa Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah berupa Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebanyak 2 dokumen
5.02.02.2.01.09.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Penyusunan dokumen berupa Pedoman Penyusunan RKA dan Pedoman Penyusunan APBD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan dokumen berupa Pedoman Penyusunan RKA dan Pedoman Penyusunan APBD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan dokumen berupa Pedoman Penyusunan RKA dan Pedoman Penyusunan APBD sebanyak 2 dokumen
5.02.02.2.02.	Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			
5.02.02.2.02.03.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyusunan dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD per Triwulan sebanyak 4 dokumen	Penyusunan dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD per Triwulan sebanyak 4 dokumen	Penyusunan dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD per Triwulan sebanyak 4 dokumen
5.02.02.2.02.05.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Penyusunan dokumen hasil koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya setiap bulan sebanyak 12 dokumen	Penyusunan dokumen hasil koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya setiap bulan sebanyak 12 dokumen	Penyusunan dokumen hasil koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya setiap bulan sebanyak 12 dokumen
5.02.02.2.02.06.	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Penyusunan dokumen hasil koordinasi, pelaksanaan kerja sama dan pemantauan transaksi non tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (dalam hal ini kerja sama Pemkab Lampung Barat dengan PT Bank Lampung) per Triwulan, sebanyak 4 dokumen	Penyusunan dokumen hasil koordinasi, pelaksanaan kerja sama dan pemantauan transaksi non tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (dalam hal ini kerja sama Pemkab Lampung Barat dengan PT Bank Lampung) per Triwulan, sebanyak 4 dokumen	Penyusunan dokumen hasil koordinasi, pelaksanaan kerja sama dan pemantauan transaksi non tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (dalam hal ini kerja sama Pemkab Lampung Barat dengan PT Bank Lampung) per Triwulan, sebanyak 4 dokumen
5.02.02.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), berupa Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), berupa Laporan Kas Daerah sebanyak 12 laporan	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), berupa Laporan Kas Daerah sebanyak 12 laporan	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), berupa Laporan Kas Daerah sebanyak 12 laporan

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan (Tahun)		
		2024	2025	2026
5.02.02.2.02.09.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Penyusunan dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait setiap bulan, berupa BA Hasil Rekonsiliasi sebanyak 12 dokumen	Penyusunan dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait setiap bulan, berupa BA Hasil Rekonsiliasi sebanyak 12 dokumen	Penyusunan dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait setiap bulan, berupa BA Hasil Rekonsiliasi sebanyak 12 dokumen
5.02.02.2.02.11.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada aparaturnya penanggung jawab pengelolaan keuangan seluruh perangkat daerah berjumlah 300 orang	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada aparaturnya penanggung jawab pengelolaan keuangan seluruh perangkat daerah berjumlah 300 orang	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada aparaturnya penanggung jawab pengelolaan keuangan seluruh perangkat daerah berjumlah 300 orang
5.02.02.2.03.	Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			
5.02.02.2.03.01.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, berupa Kertas Kerja Akuntansi 45 OPD selama 12 bulan dengan jumlah 540 laporan	Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, berupa Kertas Kerja Akuntansi 45 OPD selama 12 bulan dengan jumlah 540 laporan	Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, berupa Kertas Kerja Akuntansi 45 OPD selama 12 bulan dengan jumlah 540 laporan
5.02.02.2.03.02.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Penyusunan dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban sebanyak 282 dokumen, yang terdiri dari Laporan Bulanan Rekonsiliasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan 12 dokumen, Laporan Triwulan Rekonsiliasi dan Hasil Verifikasi Pendapatan LO dan Beban 45 OPD 180 dokumen, Laporan Semester Rekonsiliasi dan Hasil Verifikasi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas 45 OPD 90 dokumen	Penyusunan dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban sebanyak 282 dokumen, yang terdiri dari Laporan Bulanan Rekonsiliasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan 12 dokumen, Laporan Triwulan Rekonsiliasi dan Hasil Verifikasi Pendapatan LO dan Beban 45 OPD 180 dokumen, Laporan Semester Rekonsiliasi dan Hasil Verifikasi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas 45 OPD 90 dokumen	Penyusunan dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban sebanyak 282 dokumen, yang terdiri dari Laporan Bulanan Rekonsiliasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan 12 dokumen, Laporan Triwulan Rekonsiliasi dan Hasil Verifikasi Pendapatan LO dan Beban 45 OPD 180 dokumen, Laporan Semester Rekonsiliasi dan Hasil Verifikasi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas 45 OPD 90 dokumen
5.02.02.2.03.03.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran sebanyak 18 laporan, yang terdiri dari Laporan Bulanan Realisasi APBD sebanyak 12 laporan, Laporan Triwulanan Realisasi APBD sebanyak 4 laporan, dan Laporan Realisasi APBD Per Semester sebanyak 2 laporan	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran sebanyak 18 laporan, yang terdiri dari Laporan Bulanan Realisasi APBD sebanyak 12 laporan, Laporan Triwulanan Realisasi APBD sebanyak 4 laporan, dan Laporan Realisasi APBD Per Semester sebanyak 2 laporan	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran sebanyak 18 laporan, yang terdiri dari Laporan Bulanan Realisasi APBD sebanyak 12 laporan, Laporan Triwulanan Realisasi APBD sebanyak 4 laporan, dan Laporan Realisasi APBD Per Semester sebanyak 2 laporan

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan (Tahun)		
		2024	2025	2026
5.02.02.2.03.04.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi sebanyak 93 laporan, yang terdiri dari Draft LKPD LKPD 1 laporan, Buku LKPD 1 laporan, Buku Pidato Pengantar LKPD 1 laporan, Draft LK SKPD 45 laporan, dan Buku LK SKPD 45 laporan	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi sebanyak 93 laporan, yang terdiri dari Draft LKPD LKPD 1 laporan, Buku LKPD 1 laporan, Buku Pidato Pengantar LKPD 1 laporan, Draft LK SKPD 45 laporan, dan Buku LK SKPD 45 laporan	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi sebanyak 93 laporan, yang terdiri dari Draft LKPD LKPD 1 laporan, Buku LKPD 1 laporan, Buku Pidato Pengantar LKPD 1 laporan, Draft LK SKPD 45 laporan, dan Buku LK SKPD 45 laporan
5.02.02.2.03.05.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sebanyak 7 dokumen, yang terdiri dari Draft Ranperda Realisasi APBD, Draft Ranperbup Realisasi APBD, Ranperda Realisasi APBD, Ranperbup Realisasi APBD, Perda Realisasi APBD, Perbup Realisasi APBD, dan Pidato Pengantar	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sebanyak 7 dokumen, yang terdiri dari Draft Ranperda Realisasi APBD, Draft Ranperbup Realisasi APBD, Ranperda Realisasi APBD, Ranperbup Realisasi APBD, Perda Realisasi APBD, Perbup Realisasi APBD, dan Pidato Pengantar	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sebanyak 7 dokumen, yang terdiri dari Draft Ranperda Realisasi APBD, Draft Ranperbup Realisasi APBD, Ranperda Realisasi APBD, Ranperbup Realisasi APBD, Perda Realisasi APBD, Perbup Realisasi APBD, dan Pidato Pengantar	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sebanyak 7 dokumen, yang terdiri dari Draft Ranperda Realisasi APBD, Draft Ranperbup Realisasi APBD, Ranperda Realisasi APBD, Ranperbup Realisasi APBD, Perda Realisasi APBD, Perbup Realisasi APBD, dan Pidato Pengantar
5.02.02.2.03.06.	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebanyak 3 dokumen, yang terdiri dari Dokumen Tanggapan atas Temuan BPK, Dokumen Quisioner dalam Pemeriksaan BPK, dan Dokumen Rencana Aksi atas Temuan Pemeriksaan BPK	Penyusunan dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebanyak 3 dokumen, yang terdiri dari Dokumen Tanggapan atas Temuan BPK, Dokumen Quisioner dalam Pemeriksaan BPK, dan Dokumen Rencana Aksi atas Temuan Pemeriksaan BPK	Penyusunan dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebanyak 3 dokumen, yang terdiri dari Dokumen Tanggapan atas Temuan BPK, Dokumen Quisioner dalam Pemeriksaan BPK, dan Dokumen Rencana Aksi atas Temuan Pemeriksaan BPK
5.02.02.2.03.07.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Penyusunan dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah berupa Dokumen Sidang Majelis TP TGR sebanyak 1 dokumen	Penyusunan dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah berupa Dokumen Sidang Majelis TP TGR sebanyak 1 dokumen	Penyusunan dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah berupa Dokumen Sidang Majelis TP TGR sebanyak 1 dokumen
5.02.02.2.03.08.	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD per bulan sebanyak 12 dokumen	Penyusunan dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD per bulan sebanyak 12 dokumen	Penyusunan dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD per bulan sebanyak 12 dokumen

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan (Tahun)		
		2024	2025	2026
5.02.02.2.03.11.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota berupa sosialisasi dan bimbingan teknis kepada aparatur penanggung jawab pengelola keuangan seluruh perangkat daerah berjumlah 157 orang	Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota berupa sosialisasi dan bimbingan teknis kepada aparatur penanggung jawab pengelola keuangan seluruh perangkat daerah berjumlah 157 orang	Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota berupa sosialisasi dan bimbingan teknis kepada aparatur penanggung jawab pengelola keuangan seluruh perangkat daerah berjumlah 157 orang
5.02.02.2.04.	Kegiatan : Penunjang Urusan Keuangan Daerah			
5.02.02.2.04.08.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pembayaran bunga pinjaman jangka pendek Pemerintah Daerah kepada Lembaga Keuangan Bank, dan penyaluran Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Pekon, Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Pekon, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Pekon (ADP)	Pembayaran bunga pinjaman jangka pendek Pemerintah Daerah kepada Lembaga Keuangan Bank, dan penyaluran Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Pekon, Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Pekon, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Pekon (ADP)	Pembayaran bunga pinjaman jangka pendek Pemerintah Daerah kepada Lembaga Keuangan Bank, dan penyaluran Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Pekon, Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Pekon, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Pekon (ADP)
5.02.02.2.05.	Kegiatan : Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			
5.02.02.2.05.02.	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah berupa input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang tepat waktu pada aplikasi SIPD yang terintegrasi, serta pemeliharaan aplikasi	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah berupa input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang tepat waktu pada aplikasi SIPD yang terintegrasi, serta pemeliharaan aplikasi	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah berupa input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang tepat waktu pada aplikasi SIPD yang terintegrasi, serta pemeliharaan aplikasi
05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
5.02.03.2.01.	Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah			
5.02.03.2.01.01.	Penyusunan Standar Harga	Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan Pemkab Lampung Barat sebanyak 1 dokumen	Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan Pemkab Lampung Barat sebanyak 1 dokumen	Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan Pemkab Lampung Barat sebanyak 1 dokumen
5.02.03.2.01.03.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebanyak 1 dokumen	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebanyak 1 dokumen	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebanyak 1 dokumen

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan (Tahun)		
		2024	2025	2026
5.02.03.2.01.04.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Peraturan Daerah sebanyak 1 dokumen	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Peraturan Daerah sebanyak 1 dokumen	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Peraturan Daerah sebanyak 1 dokumen
5.02.03.2.01.05.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pelaksanaan input data Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan akurat pada aplikasi SIAP BMD untuk menyediakan basis data yang akurat dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah	Pelaksanaan input data Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan akurat pada aplikasi SIAP BMD untuk menyediakan basis data yang akurat dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah	Pelaksanaan input data Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan akurat pada aplikasi SIAP BMD untuk menyediakan basis data yang akurat dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah
5.02.03.2.01.06.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.07.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah melalui pemasangan dan pemeliharaan Plang Kepemilikan Tanah, Plang Larangan, dan Plang Kepemilikan Tanah	Pengamanan Barang Milik Daerah melalui pemasangan dan pemeliharaan Plang Kepemilikan Tanah, Plang Larangan, dan Plang Kepemilikan Tanah	Pengamanan Barang Milik Daerah melalui pemasangan dan pemeliharaan Plang Kepemilikan Tanah, Plang Larangan, dan Plang Kepemilikan Tanah
5.02.03.2.01.08.	Penilaian Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.09.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah seluruh perangkat daerah sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa : - Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikan Barang Milik Daerah. Permasalahan ini terkait dengan identifikasi dan inventarisasi. - Belum tersedianya basis data (database) yang akurat dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah. - Belum optimalnya pemahaman sumber daya pengelola BMD dalam pengelolaan BMD	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah seluruh perangkat daerah sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa : - Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikan Barang Milik Daerah. Permasalahan ini terkait dengan identifikasi dan inventarisasi. - Belum tersedianya basis data (database) yang akurat dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah. - Belum optimalnya pemahaman sumber daya pengelola BMD dalam pengelolaan BMD	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah seluruh perangkat daerah sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa : - Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikan Barang Milik Daerah. Permasalahan ini terkait dengan identifikasi dan inventarisasi. - Belum tersedianya basis data (database) yang akurat dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah. - Belum optimalnya pemahaman sumber daya pengelola BMD dalam pengelolaan BMD

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan (Tahun)		
		2024	2025	2026
5.02.03.2.01.10.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka mencapai target Retribusi Daerah, serta penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) akibat alasan yang sah (pemindahtanganan, Keputusan Pengadilan, Peraturan Perundangan, dan pemusnahan) berdasarkan usulan perangkat daerah	Penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka mencapai target Retribusi Daerah, serta penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) akibat alasan yang sah (pemindahtanganan, Keputusan Pengadilan, Peraturan Perundangan, dan pemusnahan) berdasarkan usulan perangkat daerah	Penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka mencapai target Retribusi Daerah, serta penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) akibat alasan yang sah (pemindahtanganan, Keputusan Pengadilan, Peraturan Perundangan, dan pemusnahan) berdasarkan usulan perangkat daerah
5.02.03.2.01.11.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah berupa Kertas Kerja Penyusutan Barang Pengguna seluruh perangkat daerah sebanyak 45 laporan	Penyusunan Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah berupa Kertas Kerja Penyusutan Barang Pengguna seluruh perangkat daerah sebanyak 45 laporan	Penyusunan Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah berupa Kertas Kerja Penyusutan Barang Pengguna seluruh perangkat daerah sebanyak 45 laporan
5.02.03.2.01.12.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sebanyak 46 laporan, yang terdiri dari Laporan Barang Milik Daerah Pemda sebanyak 1 laporan, Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sebanyak 44 laporan, dan Daftar Barang Milik Daerah Pemda sebanyak 1 laporan	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sebanyak 46 laporan, yang terdiri dari Laporan Barang Milik Daerah Pemda sebanyak 1 laporan, Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sebanyak 44 laporan, dan Daftar Barang Milik Daerah Pemda sebanyak 1 laporan	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sebanyak 46 laporan, yang terdiri dari Laporan Barang Milik Daerah Pemda sebanyak 1 laporan, Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sebanyak 44 laporan, dan Daftar Barang Milik Daerah Pemda sebanyak 1 laporan
5.02.03.2.01.13.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota kepada aparatur pengelola Barang Milik Daerah seluruh perangkat daerah berjumlah 50 orang	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota kepada aparatur pengelola Barang Milik Daerah seluruh perangkat daerah berjumlah 50 orang	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota kepada aparatur pengelola Barang Milik Daerah seluruh perangkat daerah berjumlah 50 orang

BAB VII.
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, maka indikator kinerja BKAD yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD tersebut adalah :

1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja BKAD selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.1. berikut :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2024-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

BAB VIII. PENUTUP

Dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat periode 2017-2022, maka disusunlah Renstra Perangkat Daerah pada masa transisi, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Barat terpecah menjadi 2 (dua) perangkat daerah, salah satunya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lampung Barat. Untuk itu, perlu disusun Renstra BKAD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026.

BKAD Kabupaten Lampung Barat memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah. Renstra ini disusun dalam rangka membantu mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut.

Demikianlah Renstra BKAD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026 ini disusun sebagai pedoman dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada organisasi berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai, dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu, perlu dukungan dan peran aktif seluruh aparatur BKAD serta partisipasi *stake holder* dalam pelaksanaannya.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



H. OKMAL, M.Si.

PEMBINA UTAMA MUDA

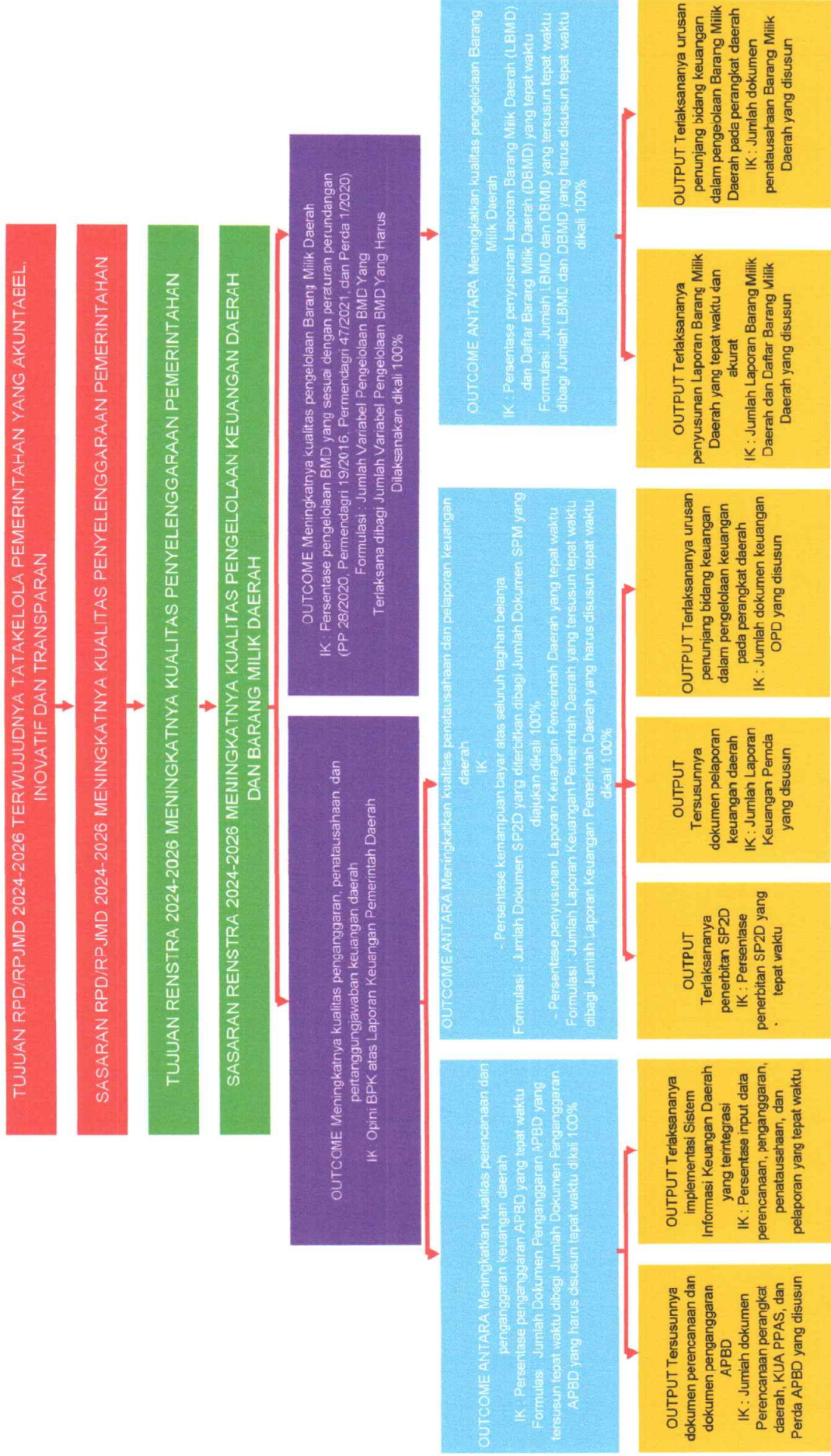
NIP. 19641005 199403 1 003

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024-2026

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA			
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Meningkatkan kualitas penerapan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat							
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Pemda berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung terhadap : 1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Sistem Pengendalian Intern 3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	WTP	WTP	WTP	Dokumen-dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan Kabupaten Lampung Barat

LAMPIRAN I
LOGICAL FRAME WORK / POHON KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024-2026



LAMPIRAN II

CASCADING BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024-2026

RPD / RPJMD 2024-2026

TUJUAN			
TERMUJUDINYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, INOVATIF DAN TRANSPARAN			
Indikator Tujuan	Satuan	Targel	
		2024	2025
Nilai Reformasi Birokrasi	Poin	58,05	58,05
		58,05	60,05



SASARAN			
MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN			
Indikator Sasaran	Satuan	Targel	
		2024	2025
Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	Poin	58,05	58,05
		58,05	60,05



RENSTRA 2024-2026

TUJUAN				
MENINGKATKAN KUALITAS PENERAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG				
Indikator Tujuan	Formulasi Pengukuran	Satuan	2024	2025
			2024	2025
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Pemda berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung terhadap : 1. Laporan Keuangan, 2. Sistem Pengendalian Intern, 3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	Predikat Opini	WTP	WTP
			WTP	WTP



SASARAN				
MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH				
Indikator Sasaran	Formulasi Pengukuran	Satuan	2024	2025
			2024	2025
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Pemda berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung terhadap : 1. Laporan Keuangan, 2. Sistem Pengendalian Intern, 3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	Predikat Opini	WTP	WTP
			WTP	WTP

SASARAN				
MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH				
Indikator Sasaran	Formulasi Pengukuran	Satuan		
		2024	2025	2026
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung terhadap : 1. Laporan Keuangan, 2. Sistem Pengendalian Intern, 3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	Preckat Opini	WTP	WTP

PROGRAM				
1. Program Panunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Pengukuran	Satuan	
			2024	2025
Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah BPKD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPKD	Hasil evaluasi SAKIP BPKD oleh Inspektorat Kabupaten	%	83,5
				83,75
				84

KEGIATAN				
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	
			2024	2025
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banyaknya dokumen perencanaan yang disusun	oknum	13
Tersusunnya Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran yang disusun	Banyaknya dokumen penganggaran yang disusun	oknum	7
Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banyaknya dokumen evaluasi kinerja yang disusun	oknum	29

SUB KEGIATAN				
Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	
			2024	2025
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	17

KEGIATAN

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan			
			2024	2025	2026	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Banyaknya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	40	42	44
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Banyaknya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang	Laporan	1	1	1
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Banyaknya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	2	2
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Banyaknya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1

SUB KEGIATAN

Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan			
			2024	2025	2026	
8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	40	42	44
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1
10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	2	2
11. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1

KEGIATAN

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan			
			2024	2025	2026	
Tersedianya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Banyaknya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	19	19	19

SUB KEGIATAN

Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan			
			2024	2025	2026	
12. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	19	19	19

KEGIATAN

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan		
			2024	2025	2026
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Banyaknya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang disusun	1	1	1
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasar Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Banyaknya Pegawai Berdasar Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3	3	3

SUB KEGIATAN

Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan		
			2024	2025	2026
13. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	1
14. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasar Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	3	3

KEGIATAN

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan		
			2024	2025	2026
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Banyaknya paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	1	1
Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Banyaknya paket barang cetak dan pengandaan yang disediakan	1	1	1
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Banyaknya dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4	4	4
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Banyaknya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu yang disusun	1	1	1
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banyaknya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disusun	1	1	1

SUB KEGIATAN

Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan		
			2024	2025	2026
15. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1
16. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1	1	1
17. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4	4	4
18. Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	1	1
19. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	1

KEGIATAN

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	Banyaknya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	Unit
			2024 18
			2025 4
			2026 5

SUB KEGIATAN

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan
20. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
			2024 18
			2025 4
			2026 5

KEGIATAN

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disusun	Laporan
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banyaknya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disusun	Laporan
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Banyaknya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan
			2024 1
			2025 1
			2026 1

SUB KEGIATAN

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan
21. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
22. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan
23. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan
			2024 1
			2025 1
			2026 1

KEGIATAN

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Banyaknya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit
			2024 62
			2025 62
			2026 62

SUB KEGIATAN

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan
24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Diteyalkan Pajak dan Perizinannya	Unit
25. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
26. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
			2024 23
			2025 23
			2026 23
			31
			31
			8
			8

SASARAN

MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH

Indikator Sasaran	Formulasi Pengukuran	Satuan	2024	2025	2026
			WTP	WTP	WTP
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Perda berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung terhadap: 1. Laporan Keuangan. 2. Sistem Pengendalian Intern. 3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	Predikat Opini			



PROGRAM

2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Pengukuran	Satuan	2024	2025	2026
				100	100	100
Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	1. Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu 2. Persentase kemampuan bayar atas seluruh tagihan belanja 3. Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat.	Jumlah Dokumen Penganggaran APBD yang tepat waktu dibagi Jumlah Dokumen Penganggaran APBD yang harus disusun tepat waktu dikali 100% Jumlah Dokumen SP2D yang diterbitkan dibagi Jumlah Dokumen SPM yang diajukan dikali 100% Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu dibagi Jumlah	%	100	100	100

KEGIATAN

9. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	2024	2025	2026
				2	2	2
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1. Jumlah Dokumen KUA dan PPAS dan Dokumen KUA dan PPAS Perubahan 2. Jumlah Perda APBD dan Perda Perubahan APBD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS dan Dokumen KUA dan PPAS Perubahan Jumlah Perda APBD dan Perda Perubahan APBD	Dokumen	2	2	2

SUB-KEGIATAN

Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	2024	2025	2026
				2	2	2
27. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	2	2
28. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	2	2
29. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2	2
30. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	2	2
31. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	2	2	2

KEGIATAN

10. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan			
			2024	2025	2026	
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1. Persentase penorbihan SPD yang tepat waktu	Jumlah SPD yang diterbitkan tepat waktu dibagi Jumlah SPD yang harus diterbitkan tepat waktu dikali 100%	%	100	100	
	2. Persentase penyerapan Dana Transfer	Realisasi Dana Transfer dibagi Anggaran Dana Transfer dikali 100%	%	100	100	
	3. Persentase lebasnya gaji pegawai tepat waktu	Jumlah pegawai yang dibayarkan gajinya tepat waktu dibagi Jumlah pegawai yang harus dibayarkan gajinya tepat waktu dikali 100%	%	100	100	
	4. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Pembayaran Berhutang Pihak Ketiga	Jumlah Laporan Kas Daerah	Laporan	12	12	12
	5. Persentase penorbihan SPD yang tepat waktu	Jumlah SPD yang diterbitkan tepat waktu dibagi Jumlah SPD yang harus diterbitkan tepat waktu dikali 100%	%	100	100	
	6. Nilai Rata-rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada OPD	Jumlah rita pembinaan seluruh OPD dibagi Jumlah OPD	Poin	80	81	82

SUB KEGIATAN

Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan		
			2024	2025	2026
32. Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penorbihan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penorbihan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penorbihan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	4	4
33. Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	12	12
34. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	4	4
35. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan	12	12
36. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Penorbihan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Penorbihan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Penorbihan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	12	12
37. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Orang	300	300

KEGIATAN

11. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan		
			2024	2025	2026
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1. Jumlah Laporan Keuangan Pemda	Jumlah Laporan Keuangan Pemda	1	1	1
	2. Jumlah Perda Realisasi APBD	Jumlah Perda Realisasi APBD	1	1	1
	3. Jumlah Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	45	45	45

SUB KEGIATAN

Name Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan		
			2024	2025	2026
38. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi, Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	540	540	540
39. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	282	282	282
40. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18	18	18
41. Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	93	93	93
42. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	7	7	7
43. Penyusunan Tanggapan/Indik Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Tanggapan/Indik Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Indik Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3	3	3
44. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1	1	1
45. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	12	12	12
46. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	157	157	157

KEGIATAN

12. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan		
			2024	2025	2026
Teraksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyediaan Bantuan Keuangan	Realisasi Bantuan Keuangan dibagi Anggaran Bantuan Keuangan dikali 100%	100	100	100

SUB KEGIATAN

Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan		
			2024	2025	2026
47. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	1	1

KEGIATAN

13. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan		
			2024	2025	2026
Teraksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase input data perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan yang tepat waktu	Jumlah data perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan yang diinput tepat waktu pada aplikasi dibagi Jumlah data perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus diinput tepat waktu pada aplikasi dikali 100%	100	100	100

SUB KEGIATAN

Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan		
			2024	2025	2026
48. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Teraksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	1	1

SASARAN

3. MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH

Indikator Sasaran	Formulasi Pengukuran	Satuan	2024	2025	2026
			WTP	WTP	WTP
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Pemda berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung terhadap: 1. Laporan Keuangan, 2. Sistem Pengendalian Intern, 3. Kepatuhan terhadap Ketentuan	Predikat Opini			

PROGRAM

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Pengukuran	Satuan		
			2024	2025	2026
Tertaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah yang optimal	Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) yang tepat waktu harus disusun tepat waktu dikali 100%	Jumlah LBMD dan DBMD yang tersusun tepat waktu dibagi Jumlah LBMD dan DBMD yang harus disusun tepat waktu dikali 100%	100	100	100

KEGIATAN

14. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan		
			2024	2025	2026
Tertaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Pemda 2. Jumlah Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) Pemda	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Pemda Jumlah Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) Pemda	1	1	1

SUB KEGIATAN

Nama Sub Kegiatan	Sasaran-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan		
			2024	2025	2026
49. Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	1	1
50. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	1	1
51. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	1	1
52. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	1	1
53. Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tertaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah	45	45	45
54. Pengamanan Barang Milik Daerah	Tertaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	1	1
55. Penilaian Barang Milik Daerah	Tertaksananya Peilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Peilaian Barang Milik Daerah	1	1	1
56. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	1	1
57. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tertaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1	1	1
58. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tertaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	45	45	45
59. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tertaksananya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	46	46	46
60. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tertaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50	50	50

LAMPIRAN III
 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output) (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2022	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Lokasi Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
UNSUR PENUNJANG BIDANG KEUANGAN Meningkatkan kualitas penerapan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten		1.5.02.		Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP Predikat Opini	WTP Predikat Opini	222.468.426.300	226.369.179.230	230.423.169.553	679.260.775.063					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BKAD	WTP Predikat Opini	WTP Predikat Opini	27.612.768.000	26.042.768.000	28.477.768.000	84 %	84 %	84 %	31.605.000	BKAD	Kec. Baik Bukit
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		5.02.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65 Dokumen	13 Dokumen	10.535.000	10.535.000	10.535.000	13 Dokumen	13 Dokumen	39 Dokumen	31.605.000	BKAD	Kec. Baik Bukit
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		5.02.01.2.01.02.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- 65 Dokumen - 35 Dokumen - 145 Dokumen	- 13 Dokumen - 7 Dokumen - 29 Dokumen	46.660.000	46.660.000	46.660.000	- 13 Dokumen - 7 Dokumen - 29 Dokumen	- 13 Dokumen - 7 Dokumen - 29 Dokumen	- 39 Dokumen - 21 Dokumen - 87 Dokumen	139.960.000	BKAD	Kec. Baik Bukit
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		5.02.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	4.120.000	4.120.000	4.120.000	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	12.360.000	BKAD	Kec. Baik Bukit
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		5.02.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	4.120.000	4.120.000	4.120.000	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	12.360.000	BKAD	Kec. Baik Bukit
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		5.02.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	4.120.000	4.120.000	4.120.000	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	12.360.000	BKAD	Kec. Baik Bukit
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		5.02.01.2.02.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	60 Dokumen	12 Laporan	13.900.000	13.900.000	13.900.000	12 Laporan	12 Laporan	36 Laporan	41.700.000	BKAD	Kec. Baik Bukit
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		5.02.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85 Dokumen	17 Laporan	5.745.000	5.745.000	5.745.000	17 Laporan	17 Laporan	51 Laporan	17.235.000	BKAD	Kec. Baik Bukit
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s.d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2022	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kunci Kinerja pada Akhir Periode Renstra Lokasi Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		5.02.01.2.02.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- 261 Orang/Bulan - 6 Laporan - 10 Laporan - 5 Dokumen	- 47 Orang/Bulan - 1 Laporan - 2 Laporan - 1 Dokumen	- 40 Orang/Bulan - 1 Laporan - 2 Laporan - 1 Dokumen	- 42 Orang/Bulan - 1 Laporan - 2 Laporan - 1 Dokumen	- 44 Orang/Bulan - 1 Laporan - 2 Laporan - 1 Dokumen	5.488.945.000	5.688.945.000	5.888.945.000	- 126 Orang/Bulan - 3 Laporan - 6 Laporan - 3 Dokumen	17.069.980.000	BKAD	Kec. Baik Bukit
		5.02.01.2.02.01.	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN		251 Orang/Bulan	47 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	42 Orang/Bulan	44 Orang/Bulan	5.488.945.000	5.688.945.000	5.888.945.000	126 Orang/Bulan	17.069.980.000	BKAD	Kec. Baik Bukit
		5.02.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.055.000	1.055.000	1.055.000	3 Laporan	3.165.000	BKAD	Kec. Baik Bukit
		5.02.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	905.000	905.000	905.000	6 Laporan	2.715.000	BKAD	Kec. Baik Bukit
		5.02.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.055.000	1.055.000	1.055.000	3 Dokumen	3.165.000	BKAD	Kec. Baik Bukit
		5.02.01.2.03.	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		38 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	4.904.000	4.904.000	4.904.000	57 Dokumen	14.712.000	BKAD	Kec. Baik Bukit
		5.02.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		38 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	4.904.000	4.904.000	4.904.000	57 Laporan	14.712.000	BKAD	Kec. Baik Bukit
		5.02.01.2.05.	Kegiatan : Administrasi Kepegawayaan Perangkat Daerah		- 0 Dokumen - 24 Orang	- 0 Dokumen - 6 Orang	- 1 Dokumen - 3 Orang	- 1 Dokumen - 3 Orang	- 1 Dokumen - 3 Orang	69.265.000	69.265.000	69.265.000	- 3 Dokumen - 9 Orang	207.795.000	BKAD	Kec. Baik Bukit
		5.02.01.2.05.05.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.265.000	9.265.000	9.265.000	3 Dokumen	27.795.000	BKAD	Kec. Baik Bukit
		5.02.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis Tugas dan Fungsi		24 Orang	6 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	60.000.000	60.000.000	60.000.000	9 Orang	180.000.000	BKAD	Seluruh Indonesia

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s.d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2022	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Lokasi Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		5.02.01.2.06.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan - Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- 5 Paket - 5 Paket - 20 Dokumen - 5 Laporan - 5 Laporan	- 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan	- 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan	- 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan	- 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan	- 3 Paket - 3 Paket - 12 Dokumen - 3 Laporan - 3 Laporan	382.481.000	382.481.000	1.147.443.000	BKAD	Kec. Baik Bukit	
		5.02.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3 Paket	5.983.000	5.983.000	17.949.000	BKAD	Kec. Baik Bukit	
		5.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3 Paket	109.950.000	109.950.000	329.650.000	BKAD	Kec. Baik Bukit	
		5.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	3.960.000	3.960.000	11.880.000	BKAD	Kec. Baik Bukit	
		5.02.01.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	4.180.000	4.180.000	12.540.000	BKAD	Kec. Baik Bukit	
		5.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	258.408.000	258.408.000	775.224.000	BKAD	Seluruh Indonesia	
		5.02.01.2.07.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	41 Unit	22 Unit	13 Unit	4 Unit	5 Unit	27 Unit	335.000.000	365.000.000	1.100.000.000	BKAD		
		5.02.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	41 Unit	22 Unit	13 Unit	4 Unit	5 Unit	27 Unit	335.000.000	365.000.000	1.100.000.000	BKAD	Kec. Baik Bukit	
		5.02.01.2.08.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- 5 Laporan - 5 Laporan - 5 Laporan	- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan	- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan	- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan	- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan	- 3 Laporan - 3 Laporan - 3 Laporan	20.808.330.000	21.005.330.000	62.424.990.000	BKAD	Kec. Baik Bukit	
		5.02.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	4.940.000	4.940.000	14.820.000	BKAD	Kec. Baik Bukit	
		5.02.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	103.390.000	103.390.000	310.170.000	BKAD	Kec. Baik Bukit	
		5.02.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	20.700.000.000	20.900.000.000	62.100.000.000	BKAD	Kec. Baik Bukit	

Tujuan	Sasarati	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s.d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2022	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Lokasi Peringkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		5.02.01.2.09.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	95 Unit	95 Unit	62 Unit	676.168.000	62 Unit	676.168.000	62 Unit	676.168.000	62 Unit	2.028.504.000		
		5.02.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	33 Unit	23 Unit	375.807.000	23 Unit	375.807.000	23 Unit	375.807.000	23 Unit	1.127.421.000	BKAD	Provinsi Lampung
		5.02.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	52 Unit	31 Unit	79.361.000	31 Unit	79.361.000	31 Unit	79.361.000	31 Unit	238.083.000	BKAD	Kec. Baik Bukit
		5.02.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	8 Unit	221.000.000	8 Unit	221.000.000	8 Unit	221.000.000	8 Unit	663.000.000	BKAD	Kec. Baik Bukit
		05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	- Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu - Persentase kemampuan bayar atas seluruh tagihan belanja - Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	- 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100%	195.443.268.000	- 100% - 100% - 100%	198.773.844.000	- 100% - 100% - 100%	198.773.844.000	- 100% - 100% - 100%	566.451.831.000		
		5.02.02.2.01.	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	- Jumlah Dokumen KUA dan PPAS dan Dokumen KUA dan PPAS Perubahan - Jumlah Perda APBD dan Perda Perubahan APBD	- 2 Dokumen - 2 Dokumen	- 2 Dokumen - 2 Dokumen	- 2 Dokumen - 2 Dokumen	2.295.851.000	- 2 Dokumen - 2 Dokumen	2.295.851.000	- 2 Dokumen - 2 Dokumen	2.295.851.000	- 6 Dokumen - 6 Dokumen	6.887.563.000		
		5.02.02.2.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	157.064.000	2 Dokumen	157.064.000	2 Dokumen	157.064.000	6 Dokumen	471.192.000	BKAD	Kec. Baik Bukit
		5.02.02.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	145.175.000	2 Dokumen	145.175.000	2 Dokumen	145.175.000	6 Dokumen	435.525.000	BKAD	Kec. Baik Bukit
		5.02.02.2.01.07.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	929.205.000	2 Dokumen	929.205.000	2 Dokumen	929.205.000	6 Dokumen	2.787.815.000	BKAD	Kec. Baik Bukit
		5.02.02.2.01.08.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	999.455.000	2 Dokumen	999.455.000	2 Dokumen	999.455.000	6 Dokumen	2.998.365.000	BKAD	Kec. Baik Bukit
		5.02.02.2.01.09.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	64.952.000	2 Dokumen	64.952.000	2 Dokumen	64.952.000	6 Dokumen	194.856.000	BKAD	Kec. Baik Bukit

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s.d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2022	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Lokasi Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		5.02.02.2.02.	Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penerbitan SPD yang tepat waktu - Persentase penyerapan Dana Transfer - Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu - Nilai Rata-rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada OPD 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% - 100% - 100% - 24 Laporan - 100% - 81 Poin 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% - 100% - 100% - 12 Laporan - 100% - 81 Poin 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% - 100% - 100% - 12 Laporan - 100% - 81 Poin 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% - 100% - 100% - 12 Laporan - 100% - 81 Poin 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% - 100% - 100% - 12 Laporan - 100% - 82 Poin 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% - 100% - 100% - 12 Laporan - 100% - 82 Poin 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% - 100% - 100% - 36 Laporan - 100% - 82 Poin 	3.387.386.000				
		5.02.02.2.02.03.	Penyapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	24 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	27.000.000	12 Dokumen	75.000.000	BKAD	Kec. Baik Bukit
		5.02.02.2.02.05.	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	85.688.000	36 Dokumen	234.480.000	BKAD	Kec. Baik Bukit
		5.02.02.2.02.06.	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	5 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	550.000.000	12 Dokumen	1.512.000.000	BKAD	Kec. Baik Bukit
		5.02.02.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	242.000.000	36 Laporan	662.000.000	BKAD	Kec. Baik Bukit
		5.02.02.2.02.09.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	296.000.000	36 Dokumen	808.000.000	BKAD	Kec. Baik Bukit
		5.02.02.2.02.11.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1500 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	35.000.000	900 Orang	95.900.000	BKAD	Seluruh Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2022	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Lokasi Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		5.02.02.2.03	Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	- Jumlah Laporan Keuangan Pemda - Jumlah Perda Realisasi APBD - Jumlah Laporan Keuangan SKPD	- 1 Laporan - 1 Dokumen - 45 Laporan	1.559.086.000	- 1 Laporan - 1 Dokumen - 45 Laporan	1.631.783.000	- 1 Laporan - 1 Dokumen - 45 Laporan	1.794.174.000	- 3 Laporan - 3 Dokumen - 135 Laporan	4.965.053.000			
		5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Pemerintahan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Pemerintahan dan Pengeluaran Kas	540 Laporan	36.231.000	540 Laporan	36.823.000	540 Laporan	40.823.000	1620 Laporan	113.877.000		BKAD	Kec. Baik Bukit
		5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan, LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan, LO, dan Beban	282 Dokumen	140.838.000	282 Dokumen	186.561.000	282 Dokumen	204.000.000	846 Dokumen	531.399.000		BKAD	Kec. Baik Bukit
		5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	136.550.000	18 Laporan	147.240.000	18 Laporan	162.000.000	54 Laporan	445.790.000		BKAD	Kec. Baik Bukit
		5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	98 Laporan	398.000.000	93 Laporan	490.022.000	93 Laporan	539.000.000	279 Laporan	1.427.022.000		BKAD	Kec. Baik Bukit
		5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	7 Dokumen	580.000.000	7 Dokumen	601.018.000	7 Dokumen	661.018.000	21 Dokumen	1.842.036.000		BKAD	Kec. Baik Bukit
		5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Dokumen	40.201.000	3 Dokumen	40.201.000	3 Dokumen	44.201.000	9 Dokumen	124.603.000		BKAD	Kec. Baik Bukit
		5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	126.286.000	1 Dokumen	20.833.000	1 Dokumen	23.000.000	3 Dokumen	170.124.000		BKAD	Kec. Baik Bukit
		5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	12 Dokumen	27.808.000	12 Dokumen	28.132.000	12 Dokumen	31.132.000	36 Dokumen	87.072.000		BKAD	Kec. Baik Bukit
		5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	158 Orang	73.172.000	157 Orang	80.953.000	157 Orang	89.000.000	471 Orang	243.130.000		BKAD	Kec. Baik Bukit
		5.02.02.2.04	Kegiatan - Penunjang Ujisan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan	100 %	187.035.833.000	100 %	190.014.821.000	100 %	192.994.657.000	100 %	570.045.311.000			
		5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	187.035.833.000	1 Laporan	190.014.821.000	1 Laporan	192.994.657.000	3 Laporan	570.045.311.000		BKAD	Kec. Baik Bukit

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2022	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Lokasi Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		5.02.02.2.05.	Kegiatan : Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang tepat waktu	100 %	100 %	314.982.000	377.978.000	453.574.000	1.146.534.000	100 %	100 %	BKAD	Kec. Balik Bukit	
		5.02.02.2.05.02.	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	314.982.000	377.978.000	453.574.000	1.146.534.000	1 Dokumen	3 Dokumen	BKAD	Kec. Balik Bukit	
		05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) yang tepat waktu	100 %	100 %	2.621.039.300	2.883.143.230	3.171.457.563	8.675.640.083	100 %	100 %			
		5.02.03.2.01.	Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Pemda - Jumlah Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) Pemda	- 5 Laporan - 5 Dokumen	- 1 Laporan - 1 Dokumen	2.621.039.300	2.883.143.230	3.171.457.563	8.675.640.083	- 1 Laporan - 1 Dokumen	- 3 Laporan - 3 Dokumen			
		5.02.03.2.01.01.	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Ditusun	5 Dokumen	1 Dokumen	200.324.850	220.357.335	242.393.069	663.075.254	1 Dokumen	3 Dokumen	BKAD	Provinsi Lampung	
		5.02.03.2.01.03.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	275.000.000	302.500.000	332.750.000	910.250.000	1 Dokumen	3 Dokumen	BKAD	Kec. Balik Bukit	
		5.02.03.2.01.04.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	66.000.000	72.600.000	79.860.000	218.460.000	1 Dokumen	3 Dokumen	BKAD	Kec. Balik Bukit	
		5.02.03.2.01.05.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5 Laporan	1 Laporan	543.193.200	597.512.520	657.263.772	1.757.969.492	1 Laporan	3 Laporan	BKAD	Kec. Balik Bukit	
		5.02.03.2.01.06.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	225 Laporan	45 Laporan	329.688.700	362.657.570	398.923.327	1.051.269.597	45 Laporan	135 Laporan	BKAD	Seluruh Kecamatan	
		5.02.03.2.01.07.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5 Laporan	1 Laporan	148.537.400	163.391.140	179.730.254	451.658.794	1 Laporan	3 Laporan	BKAD	Seluruh Kecamatan	
		5.02.03.2.01.08.	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 Laporan	1 Laporan	488.272.400	537.099.640	590.809.604	1.616.181.644	1 Laporan	3 Laporan	BKAD	Kec. Balik Bukit	
		5.02.03.2.01.09.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Laporan	1 Laporan	68.486.800	76.445.380	84.089.918	230.031.098	1 Laporan	3 Laporan	BKAD	Seluruh Kecamatan	
		5.02.03.2.01.10.	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pemenuhan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemenuhan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	159.151.300	175.066.430	192.573.073	526.790.803	1 Dokumen	3 Dokumen	BKAD	Seluruh Kecamatan	
		5.02.03.2.01.11.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	225 Laporan	45 Laporan	165.636.900	182.200.590	200.420.649	548.258.139	45 Laporan	135 Laporan	BKAD	Kec. Balik Bukit	
		5.02.03.2.01.12.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah rang Disusun	230 Laporan	46 Laporan	77.392.150	85.131.365	93.644.502	256.168.017	46 Laporan	138 Laporan	BKAD	Kec. Balik Bukit	
		5.02.03.2.01.13.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang	50 Orang	96.346.600	108.181.260	118.999.316	325.627.246	50 Orang	150 Orang	BKAD	Kec. Balik Bukit	